



BALANG
INSTITUTE

CRITICAL ECOSYSTEM
PARTNERSHIP FUND



Burung
INDONESIA
Conserving Nature, with Food

“ MENINGKATKAN LAYANAN EKOSISTEM DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
DI KAWASAN HUTAN LINDUNG LOMPOBATTANG
MELALUI KEBIJAKAN PROGRAM PARA PIHAK YANG KOLABORATIF ”

Balang Institute



LAPORAN AKHIR PROGRAM
Juni 2016 – Juni 2017 (12 bulan)

Wilayah Pendanaan : Desa Pattaneteang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan

KBA : Karaeng-Lompobattang (IDN 138)

Strategic Direction(s) : perlindungan tapak;

Nama Proyek : Meningkatkan layanan ekosistem dan keanekaragaman hayati di kawasan hutan lindung Lompobattang melalui kebijakan program para pihak yang kolaboratif

Nomor Laporan : 03

Periode waktu : Juni 2016 – Juni 2017

Disampaikan oleh : Andi Adriadi

Tanggal : 02 Oktober 2017

Tanggal laporan berikutnya:

Hibah CEPF:

(a) dalam USD: 20,000

(b) dalam mata uang lokal (Rp) : 245,000,000

Kontribusi Mitra: berupa *In kind* meliputi alokasi staff, kantor dan perlengkapan pendukung kerja

Periode proyek: Juni 2016 – Juni 2017

Lembaga pelaksana (mitra): Balang Institute


A. Kondisi & perkembangan program secara umum,

Program perlindungan tapak bertajuk **“Meningkatkan Layanan Ekosistem Dan Keanekaragaman Hayati Di Kawasan Hutan Lindung Lompobattang Melalui Kebijakan Program Para Pihak Yang Kolaboratif”** berlokasi di Desa Pattaneteang, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Program ini dilaksanakan Balang Institute atas kerjasama dengan Burung Indonesia dan dukungan pendanaan kemitraan untuk perlindungan wilayah kritis di kawasan penting, atau dikenal dengan *Critical Ecosystem Partnership Fund* (CEPF).

Kegiatan dalam proyek ini berfokus pada perencanaan penggunaan lahan yang mendukung konservasi dan peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengelolaan lahan yang berkelanjutan, dengan mendorong lahirnya perencanaan dan implementasi yang mengkolaborasikan banyak pihak di dalamnya.

Pengumpulan data dan informasi mengenai potensi dan penggunaan lahan dilakukan dengan cara melakukan pemetaan partisipatif wilayah administrasi desa, lahan garapan kelompok tani dan areal kerja hutan desa. Peta yang dihasilkan memuat informasi luas wilayah administrasi desa pattaneteang, areal kerja huta desa, penggunaan lahan sungai dan mata air. Metode pengumpulan data melalui pemetaan partisipatif, grup diskusi terfokus dan lokakarya melibatkan petani penggarap lahan, pemerintah desa hingga dinas terkait di tingkat kabupaten.

Dalam pelaksanaannya implementasi program menemukan tantangan tidak sinkronnya Log Frame Activity (LFA) dengan keadaan di lapangan. Tantangan pertama adalah LFA tidak memuat kegiatan sosialisasi program, sementara keadaan di lapangan membutuhkan sosialisasi untuk membangun kesiapan masyarakat dan pemerintah desa untuk bersama-sama melaksanakan program. Tantangan lainnya adalah tidak sinkronnya informasi awal tentang jumlah kelompok tani yang terdaftar di dinas pertanian dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Data awal yang diperoleh sebagaimana termuat dalam proposal menyebutkan terdapat 17 kelompok tani, kenyataan di lapangan hanya terdapat 13 kelompok



tani berdasarkan hampan. penyelesaian tantangan tersebut membutuhkan lebih banyak koordinasi dengan berbagai pihak, hingga durasi setiap aktivitas tidak sama persis dengan LFA. Koordinasi yang intensif untuk menyelesaikan perbedaan data baik itu dengan kelompok tani maupu dengan pihak pemerintah juga berdampak positif berupa tingginya antusiasme masyarakat dan pemerintah desa untuk terlibat dalam program, menghasilkan beragam informasi yang memudahkan penyusunan dokumen perencanaan.

Segala hal terkait proses perencanaan dilakukan dengan melibatkan anggota masing-masing dari kelompok tani dan BUMDes. Perencanaan ini menghasilkan 13 dokumen Rencana Defenitif Kebutuhan_Kelompok Tani (RDK-KT) dan Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD) BUMDes Desa Pattaneteang. Kemudian kedua dokumen ini menjadi acuan dalam pembuatan Rencana Tata Guna Lahan (RTGL) Desa Pattaneteang.

Dokumen-dokumen yang dihasilkan kemudian menjadi media komunikasi di bulan-bulan akhir proyek untuk mendapat dukungan dari para pihak yang berkepentingan baik level pemerintah desa sampai ke pemerintah kabupaten bantaeng. Dukungan dari para pihak terutama pemerintah desa dan masyarakat cukup tinggi sejak awal kegiatan. Bagi pemerintah desa, program ini akan memudahkan pemerintah desa dalam merancang pembangunan desa sebab data yang dihasilkan berbasis kondisi penggunaan lahan Desa Pattaneteang.

Dari dokumen-dokumen yang dihasilkan, dapat dilihat bahwa proses-proses pembuatan dokumen perencanaan ini memperkenalkan pengetahuan dan model baru dalam merancang sebuah pembangunan di desa. Gagasan-gagasan pembangunan dilahirkan dari tingkat tapak melalui masyarakat yang tergabung dalam keanggotaan kelompok tani maupun yang mengelola hutan desa melalui BUMDes. Selain itu peningkatan keterampilan melalui pemetaan partisipatif dapat mengenali potensi dan masalah-masalah baik itu di lahan garapan kelompok tani maupun di kawasan hutan desa.

Proyek ini juga memperkenalkan peluang pasar bagi petani kopi dan pemungut madu hutan, melalui pelatihan pemasaran dan budidaya lebah madu dan kopi. Ini sebagai upaya untuk membantu peningkatan pendapatan petani. Selain pemberian pelatihan kopi dan madu, sekolah lapang dengan membuat tiga kebun demoplot di tiga dusun Desa Pattaneteang juga dilakukan. Kebun demoplot ini diklasifikasi dalam tiga klaster lahan yang telah berkembang

sebelumnya. Pembagian tiga klasifikasi ini berdasar pada kebun campur, kebun cengkih dan kebun kopi.

B. Capaian-capaian dari implemnetasi strategi program, antara lain:

1. Peta Tataguna Lahan

Peta tata gua lahan desa pattaneteang yang dibuat secara partisipati merupakan sebuah metode untuk melibatkan perwakilan pemerintah dan masyarakat secara **luas** dalam merencanakan dan membuat peta yang menghasilkan informasi tentang wilayah administratif desa, infrastruktur, kawasan hutan, lahan pertanian, mata air, sungai dan area longsor. Lokakarya pemetaan partisipatif yang digelar untuk menyusun rencana pemetaan menghasilkan sketsa rencana pemetaan tim kerja pemetaan partisipatif yang melibatkan perwakilan kelompok tani, pengelola hutan, unsur pemerintah desa dan petugas penyuluh pertanian.

Proses pengambilan titik koordinnat dan analisa tutupan lahan mengelaborasi informasi dari masyarakat, dokumen resmi dari pemerintah seperti peta blok, peta RPJMDes, dan peta Aral kerja kawasan hutan dengan keadaan di lapangan. Hasilnya adalah peta tata gunalahan yang memuat informasi mengenai batas administrasi desa, kawasan hutan, peta lahan garapan 13 kelompok tani, sungai, mata air, tutupan lahan terbangun dan non terbangun.

NO	KELOMPOK	ANGGOTA
1	Balla Lompoa	102
2	Batu Massong 1	31
3	Batu Massong Hijau	42
4	Biring Ere	107
5	Bungeng 1	37
6	Bungenge 2	37
7	Kulepang 1	30
8	Kayu Mamana	166
9	Mandiri	47
10	Pemuda Tani Kulepang	30
11	Pucuk Mekar	93
12	Sikamaseang	87
13	Tunas Harapan	56

Tabel 1.

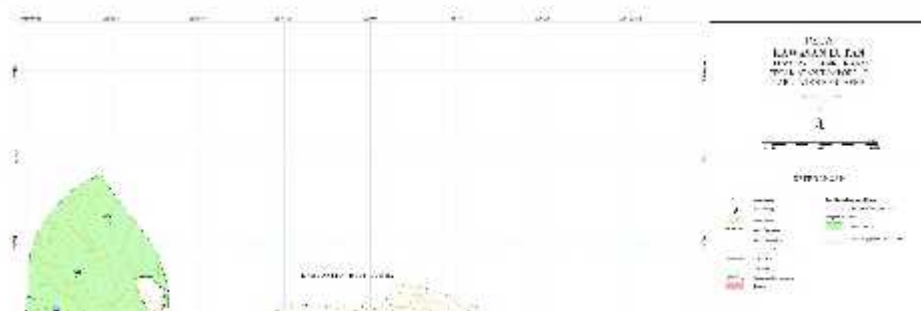
Keanggotaan

Kelompok Tani Desa Pattaneteang

Peta yang dihasilkan menunjukkan adanya perbedaan mengenai batas administrasi desa di lapangan dengan batas tertera pada peta RPJMDes, serta batas kawasan hutan di lapangan dan batas yang tertera pada Peta Areal Kerja Hutan Desa dari kementerian kehutanan. Lokakarya hasil pemetaan partisipatif yang melibatkan masyarakat, pemerintah desa dan pemerintah kabupaten menjadi agenda penting dalam memahami masalah dan potensi Desa Pattaneteang.

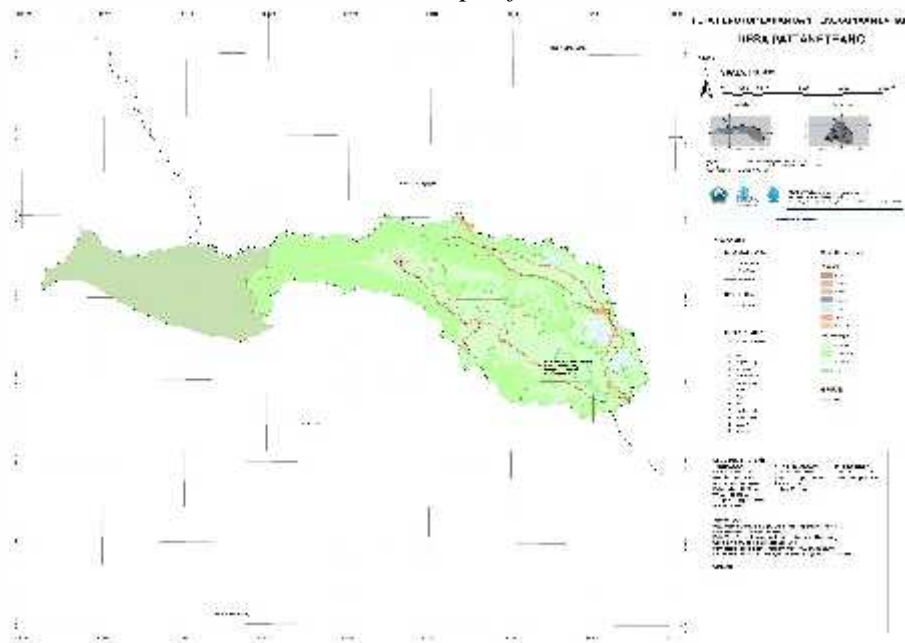
Lokakarya ini mengundang para pihak yang ada dalam lingkungan pemerintah kabupaten diantaranya Kepala Bappeda, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPM-PD), Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Camat Tompobulu. Atas temuan-temuan ini para pihak dapat mengetahui masalah dan potensi di Desa Pattaneteang.

Gambar 1.1 *Peta Administrasi Desa Pattaneteang menurut Administrasi Kabupaten Bantaeng*



AN

Gambar 1.2 *Peta Administrasi dan tutupan lahan Desa Pattaneteang Hasil Pemetaan Partisipatif*



Perbedaan batas-batas tersebut lebih lanjut dikonsultasikan BAPPEDA dan Bagian Pemerintahan Sekretariat daerah Kabuten Bantaeng. Perbedaan batas desa yang juga merupakan batas antara kabupaten Bantaeng dan Bulukumba dikonsultasikan hingga

tingkat kementerian dalam negeri dan saat ini sedang dalam proses perencanaan untuk memertegas batas antar kabupaten.

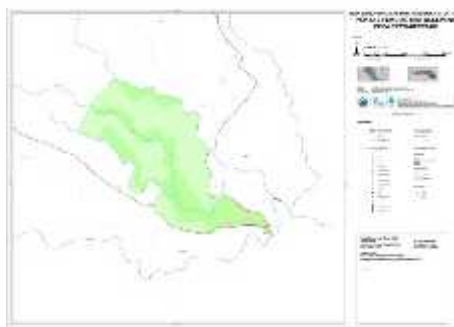
Sementara perbedaan batas kawasan hutan pada Peta Area kerja Hutan Desa dengan batas dilapangan yang ditandai dengan patok batas hutan menunjukkan strategi untuk mencapai output pertama yakni “Pembukaan Lahan Pertanian dalam Kawasan Hutan Desa agar luasannya tidak bertambah” adalah memastikan Rencana Tahunan Hutan Desa tidak memuat rencana penanaman cengkih. Untuk menyelesaikan perbedaan peta dari kementerian dengan keadaan dilapangan untuk sementara masih menunggu penunjukan pejabat baru pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Je’neberang 2 yang membawahi kawasan hutan di kabupaten Bantaeng.

Peta ini juga dapat menunjukkan masalah-masalah tenurial dalam Hutan Desa yang memperlihatkan perbedaan pemahaman batas kawasan hutan antara masyarakat dan pemerintah. Dari sini dapat dilihat penyebab terjadinya penguasaan lahan dalam kawasan hutan versi peta kementerian kehutanan oleh masyarakat dengan memilih tanaman cengkih di dalamnya.

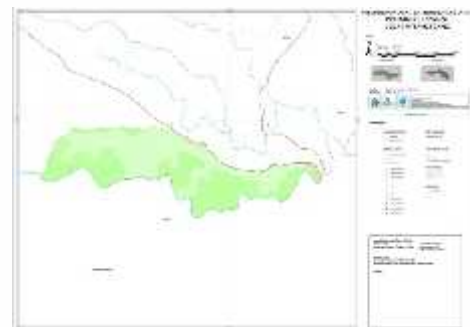
Pada akhirnya peta tata guna lahan memudahkan para pihak melakukan pengawasan, perlindungan dan perancangan program yang objektif atas wilayah Desa Pattaneteang. perencanaan tersebut antara lain berupa RDK-KT 13 Kelompok Tani, RTHD dan RTGL.

Berikut gambar peta kelompok tani yang dihasilkan

Gambar 1.3 *Peta Pemuda Tani Kulepang*



Gambar 1.4 *Peta Poktan Kulepang*



Gambar 1.5 *Peta Poktan Bungeng I*



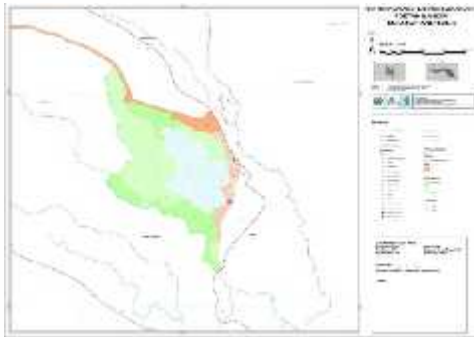
Gambar 1.6 *Peta Poktan Bungeng II*





Gambar 1.7 *Peta Poktan Mandiri*

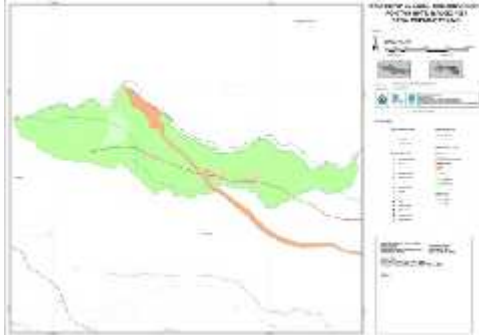
Gambar 1.8 *Peta Poktan Batumassong Hijau*



Gambar 1.9 *Peta Poktan Batumassong I*



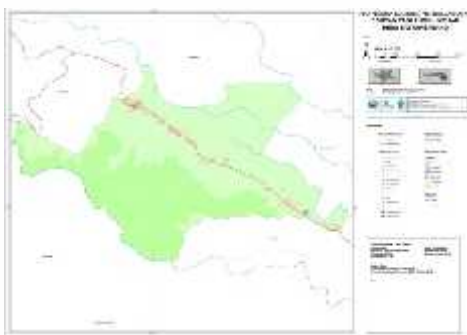
Gambar 1.10 *Peta Poktan Kayu Mamana'*



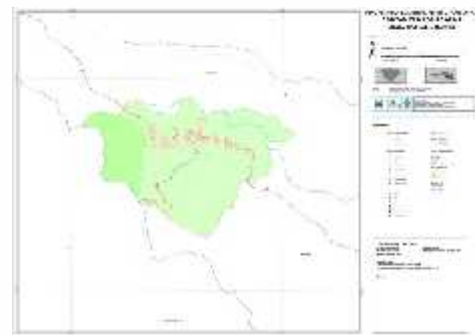
Gambar 1.11 *Peta Poktan Pucuk Mekar*



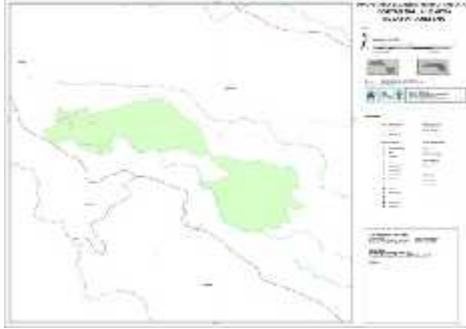
Gambar 1.12 *Peta Poktan Tunas Harapan*



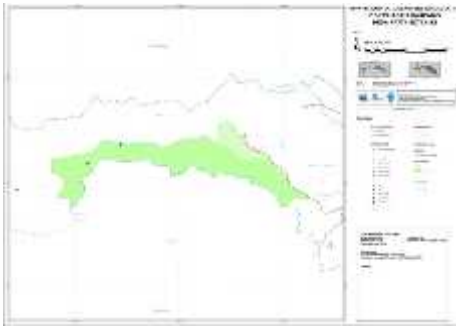
Gambar 1.13 *Peta Poktan Balla Lompoa*



Gambar 1.14 *Peta Poktan Biring Ere*



Gambar 1.15 Peta Poktan Sikamaseang



2. Rencana Definitif Kebutuhan -Kelompok Tani (RDK-KT)

RDK-KT secara reguler disusun setiap tahun oleh kelompok tani difasilitasi oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dari Dinas Pertanian. Dokumen tersebut berisi Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) serta kebutuhan sarana produksi pertanian masing-masing kelompok. Menurut Ariyanto, PPL desa Pattaneteang, selama ini RDK-KT disusun berdasarkan kebutuhan implementasi program dari dinas pertanian kabupaten.

Pemetaan partisipatif tataguna lahan yang menghasilkan peta lahan garapa kelompok tani memudahkan kelompok tani menyusun dokumen RDK-KT. Dokumen RDK-KT tersebut memuat data jumlah dan jenis tanaman mata air, sungai, dan teknologi yang mendukung pengelolaan lahan dan hasil produksi pertanian pada 13 kelompok tani yang dimaksud.

Perencanaan pengelolaan lahan tidak lagi berbasis petak-petak kebun, tetapi lebih memperhatikan pengelolaan lahan secara bentang alam. Melalui RDK-KT kelompok tani menata pengelolaan lahan produksi dan menempatkan sempadan sungai dan mata air sebagai wilayah lindung dengan tidak membolehkan menanam tanaman semusim dan tanaman monokultur seperti cengkih. Wilayah lindung tersebut akan ditanami pohon yang

dikombinasi dengan kopi atau tanaman produktif lainnya seperti pala. Untuk mendukung pengelolaan lahan yang berkelanjutan RDK-KT juga memuat rencana pembangunan infrastruktur seperti embung, mini check dam dan jalan usaha tani.

Tabel 2. RDK-KT untuk sarana produksi pertanian di Desa Pattaneteang

NO	NAMA KELOMPOK TANI	LUAS LAHAN (ha)	JUMLAH ANGGOTA	RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK TANI - SARANA PRODUKSI PERTANIAN
1	Balla Lompoa	29	102	Pengadaan Mesin Palper Kopi, Roasting Kopi, Mesin Pemotong Rumput, Mesin Pompa Air, Pupuk Kompos 1120 Sak, Mesin Pemipil Cengkeh.
2	Batu Massong 1	41	31	Pengadaan Pupuk, Herbisida, Pemotong Rumput, Mesin Penyemprot Herbisida dan Pesticida.
3	Batu Massong Hijau	56	42	Pengadaan Mesin Palper, Pengadaan Mesin Huller Padi, Pompa Penyemprot Gulma, Pemotong Rumput, Mesin Pompa Air, Pupuk Urea dan SP36
4	Biring Ere	115	107	Pengadaan Mesin Palper dan Mesin Huller kopi
5	Bungeng 1	25	37	Pengadaan Mesin Palper, Pengadaan Mesin huller padi, Pompa Penyemprot Gulma, mesin pemotong rumput, Pupuk urea dan organik
6	Bungenge 2	20	37	Pengadaan Pupuk, Handtraktor, Herbisida, Pemotong Rumput, Mesin Penyemprot Herbisida dan Pesticida
7	Kulepang 1	32	30	Pengadaan Pupuk, Herbisida, Pemotong Rumput, Mesin Penyemprot Herbisida dan Pesticida.
8	Kayu Mamana	96	166	Pengadaan Mesin Pompa/ penyedot Air, Mesin Pemipil Cengkeh, Pupuk organik dan Saprodi
9	Mandiri	39	47	Pengadaan Pupuk subsidi, herbisida, pestisida, mesin semprot, handtraktor, mesin palper kopi, mesin pemipil cengkeh dan mesin pompa air
10	Pemuda Tani Kulepang	35	30	Pengadaan Mesin Palper, Pompa Penyemprot Gulma, Pemotong Rumput, Mesin Pompa Air, Pupuk Organik, Urea dan SP36, mesin pemipil cengkeh
11	Pucuk Mekar	78	93	Pengadaan Mesin Palper Kopi, mesin huller kopi, Roasting Kopi, Mesin

				Pemotong Rumput , Mesin Pompa Air, Saprodi, Mesin Pemipil Cengkeh.
12	Sikamaseang	80	87	Pengadaan Mesin palper kopi, huller kopi, Mesin Kemasan Kopi, mesin industry kaliandra, pupuk organik
13	Tunas Harapan	43	56	Pengadaan Mesin Pemotong Rumput, mesin Roasting, Mesin Bubuk kopi, mesin pengering kopi, mesin huller kopi, mesin penyemprot rumput, herbisida, pestisida dan pupuk organik

3. Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD)

Hutan Desa Pattaneteang mendapatkan SK Penetapan Areal Kerja (PAK) Hutan Desa dari Kementerian Kehutanan: No. 55/Menhut-II/2009, SK Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) dari Gubernur Sulawesi Selatan: No. 3804/XI/2010, SK pengesahan Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD) dari Gubernur dengan No. 1465/V/2012 dan pengesahan Rencana Tahunan Hutan desa (RTHD) oleh bupati Bantaeng pada tahun 2014.

Dokumen Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD) adalah turunan Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD) yang harus dibuat setiap tahun. Namun akibat keterbatasan sumber daya manusia dan bubarnya Dinas Kehutanan Bantaeng berganti menjadi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Je'neberang 2, Badan Usaha Milki Desa (BUMDes) Sipakainga sebagai Lembaga Pemegang Pengelola Hutan Desa (LPHD) hanya menyusun RTHD pada tahun 2014. Pada 2015 dan 2016 BUMDes Sipakainga absen menyusun RTHD.

Pada tahun ini melalui program CEPF, BUMDes Sipakainga kembali menyusun draft RTHD. Penyusunan RTHD terdiri 5 tahap, FGD, wawancara dan pertemuan untuk menyusun draft RTHD. Penyusunan RTHD melibatkan Kepala Desa Pattaneteang,

Pengurus BUMDes, masyarakat pengelola Hutan Desa dan unsur perempuan. total peserta yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 36 orang, 13 perempuan dan 23 laki-laki.

Draft RTHD tersebut adalah hasil refleksi dan review atas dokumen RKHD tahun 2010. Review dan refleksi dilakukan disebabkan adanya temuan pemetaan partisipatif tataguna lahan yang menunjukkan luas Areal Kerja Hutan Desa versi SK kementerian adalah 339 ha, sementara menurut pemetaan partisipatif tataguna lahan kawasan huta di desa pattaneteang hanya adalah seluas 235 ha.

Perbedaan luas tersebut diakibatkan perbedaan batas desa yang menjadi acuan pembuatan peta. peta versi kementerian kehutanan menempatkan sungai senggang sebagai batas desa, yang sekaligus batas kabupaten, sementara versi peta partisipatif tataguna lahan yang digunakan sebagai acuan penyusunan draft RTHD 2017 menempatkan sungai bialo sebagai batas desa. Pemilihan sungai bialo sebagai acuan dalam membuat peta tataguna lahan merujuk pada keadaan yang sebenarnya di lapangan, di mana kampung senggang yang berada disebelah selatan sungai bialo merupakan wilayah Kelurahan Borong Rappoa, Kabupaten Bulukumba.

Perbedaan luasan juga berimbas pada pembagian blok, misalnya blok perlindungan anoa yang semestinya tak ada aktifitas pengelolaan masyarakat di dalamnya, fakta di lapangan blok ini terdapat tanaman kopi. Dengan demikian draft RTHD memuat rekomendasi untuk memvalidasi luas areal kerja hutan desa dan menata ulang blok dalam hutan desa. Namun demikian, aktivitas yang berkaitan dengan penanaman dan pengelolaan hasil hutan tetap direncanakan.

4. Dokumen Rencana Tata Guna Lahan

Dokumen Rencana Tata Guna Lahan (RTGL) Desa Pattaneteang disusun berdasar perencanaan pengelolaan di Hutan Desa dan perencanaan pengelolaan Lahan Garapan Kelompok Tani yang termuat dalam RTHD dan RDK_KT. Dokumen RTGL disusun bersama masyarakat dan pemerintah Desa Pattaneteang. RTGL memuat tentang kondisi spasial dan perencanaan penataan lahan produksi dan lindung.

Dokumen Rencana Tata Guna Lahan Desa Pattaneteang, juga mengacu pada Undang-undang No. 26 tahun 2007, tentang Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kabupaten

Jenepono No.2 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 – 2031. Rencana Tata Guna Lahan Desa Pattaneteang, sangat terkait dengan pemahaman yang memadai atas orientasi peruntukan kawasan dalam RTRW Kabupaten Bantaeng. Ini akan memberikan penilaian dan gambaran yang utuh terkait dengan pembangunan kawasan di Kabupaten Bantaeng. Dengan begitu, dokumen rencana tata guna lahan Desa Pattaneteang menjadi dokumen yang dapat dijadikan acuan oleh para pihak untuk digunakan sebagai pedoman dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang desa. Berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat mengacu pada arahan pemanfaatan ruang, sehingga ruang yang terbatas di Desa Pattaneteang sangat penting untuk dibuatkan rencana penggunaannya, agar dapat dimanfaatkan secara optimal dengan tanpa merusak tanah dan lingkungan.

Selain itu Desa Pattaneteang juga di peruntukkan sebagai kawasan perlindungan resapan air dan kawasan lindung setempat. Desa Pattaneteang adalah hulu DAS penting bagi DAS Bialo dimana wilayah DAS ini berada di kabupaten bantaeng dan kabupaten bulukumba.

Dengan melihat muatan dokumen perencanaan ruang di tingkat kabupaten, serta penilaian atas kesesuaian keadaan alam, corak produksi, dan keadaan masyarakat desa Pattaneteang, diharapkan dokumen rencana tata guna lahan Desa Pattaneteang, sebagai penjabaran yang lebih tajam dan detil atas dokumen perencanaan ruang di tingkat kabupaten. Akan tetapi apabila ada ketidaksesuaian dalam perencanaan pola dan struktur pemanfaatan ruang, maka dokumen rencana tata guna lahan Desa Pattaneteang yang disusun secara partisipatif dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perubahan/revisi dokumen perencanaan ruang yang telah ada sebelumnya.

Perkembangan keadaan sosial dan situasi ekonomi masyarakat Desa Pattaneteang yang di pengaruhi oleh corak produksi perkebunan, menuntut Pemerintah Desa dan Masyarakat Pattaneteang melakukan inisiatif penatagunaan lahan yang terencana, strategis dan berkelanjutan. kesadaran ini yang kemudian melahirkan gagasan untuk membuat dokumen rencana tata guna lahan Desa Pattaneteang, yang dalam penyusunannya setidaknya memiliki prasyarat sebagai berikut:

1. *Local based flexible*, yang dapat disesuaikan dengan kesepakatan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan permasalahan yang berkembang di Desa Pattaneteang.

2. *Transparancy (political accepted)*, terbuka dalam proses pembangunan dengan melibatkan masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sejak dari awal. Semua pihak menaati kriteria, norma, prosedur, standar dan manual yang sebelumnya telah disepakati.
3. *Pro bussiness (layak ekonomi)*, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
4. *Berkesinambungan*, mempertimbangkan pemanfaatan jangka panjang dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Rencana dan masa depan pembangunan Desa Pattaneteang tidak lagi hanya ditentukan oleh (kebijakan) dari pusat, tetapi juga atas kreativitas masyarakat yang didukung oleh Pemerintahan Propinsi dan Kabupaten. Disisi lain, penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah tidak bisa lagi dijalankan dengan menggunakan ‘*command and rule paradigm*’ seperti masa lalu tetapi harus dengan *pendekatan partisipatif*. Semakin memberi akses pada masyarakat untuk berpartisipasi, semakin bisa dibangun rasa kepemilikan yang tinggi terhadap hasil-hasil pembangunan itu sendiri.

Berkaitan dengan penyajian data-data spasial perencanaan ruang dan untuk mendukung peranan masyarakat terhadap sumber daya yang menopang kehidupan mereka selama ini maka penting memberikan akses atau ruang dialog untuk menentukan masa depan terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan tempat mereka hidup dan berketurunan. Perencanaan penggunaan lahan Desa Pattaneteang dilandasi dengan pemahaman akan potensi dan permasalahan terkini, sehingga dengan pemahaman potensi dan mengetahui untung-rugi investasi maka akan memberikan gambaran dan arahan yang lebih objektif bagi masyarakat maupun pemerintahan dalam bentuk Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa Pattaneteang.



III. OUTPUT

Sengkarut data spasial yang tersedia yang membuat pelaksanaan kegiatan program beberapa kali harus tersendat, pada akhirnya bisa dilewati. Keberhasilan mengatasi sengkarut data tersebut tidak lepas dari antusiasme masyarakat dan pemerintah desa serta beberapa dinas yang memiliki kaitan dengan hasil yang akan dicapai program, serta peran besar koordinator wilayah Sulawesi dalam memberikan jasa konsultasi untuk menemukan jalan keluar.

Sengkarut data yang dimaksud antara lain, perbedaan batas desa yang tertera pada peta administrasi desa dengan keadaan di lapangan, perbedaan luas Areal Kerja Hutan Desa versi Kementerian Kehutanan dengan keadaan di lapangan, perbedaan data kelompok tani yang erat kaitannya dengan lahan garapan dan keanggotaan kelompok berdampak pada alokasi anggaran dan alokasi waktu. Kajian dokumen dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait menjadi kunci dalam mendorong pihak-pihak terkait untuk menerima data-data yang dihasilkan program ini.

Data spasial memegang peranan penting dalam mencapai tujuan jangka panjang program “Meningkatnya layanan ekosistem dan keanekaragaman hayati di kawasan hutan lindung Lompobattang”, sebab tujuan tersebut akan dicapai dengan menyusun 3 buah dokumen perencanaan yang akan menjadi acuan pengelolaan bentang alam, yakni RDK-KT, RTHD dan RTGL.

A. Objectif

Objektif program ini adalah “Tidak bertambah tekanan lahan pertanian dalam kawasan Hutan Desa Pattaneteang di KBA Karaeng Lompobattang”.

Untuk mencapai objektif tersebut maka indikator yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan lahan pertanian dalam kawasan Hutan Desa tidak bertambah
2. Implementasi RTHD selaras dengan RKHD
3. Implementasi RTHD dan RDK-KT terintegrasi dengan RTR Desa.

Keterlibatan masyarakat secara luas dalam menyusun dokumen yang disebutkan pada indikator diatas menimbulkan kesadaran kolektif yang memudahkan implementasi dokumen perencanaan. kesadaran kolektif yang dimaksud antara lain, 28 ha cengkih yang masuk dalam areal kerja hutan desa yang telah berumur 5-7 tahun tumbuh tidak maksimal (kerdil) dan sampai saat ini belum satu pohon pun yang menghasilkan buah. menurut masyarakat hal itu dipengaruhi iklim yang dingin karna berada pada ketinggian 1.300 mdpl, serta banyaknya pohon yang menjadi naungan. selain itu jarak yang jauh tidak memungkinkan masyarakat melakukan perawatan yang intensif. Kesadaran tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen RTHD.

Dengan demikian poin 1 dan 3 pada indikator yang ditentukan sudah terpenuhi. semetara poin 2 sudah bisa dipastikan tidak bisa dipenuhi, karena luas Areal Kerja Hutan Desa sebagaimana yang tertera dalam RKHD berbeda dengan keadaan di lapangan. perbedaan tersebut saat ini menjadi agenda pemerintah desa untuk membangun koordinasi dengan instansi terkait.

B. Uotput

Terdapat 11 kegiatan yang dengan 3 uotput diharapkan, yakni :1) Pembukaan lahan pertanian dalam kawasan Hutan Desa tidak bertambah. 2) Pengembangan mata pencaharian masyarakat. 3) Meningkatnya kapasitas BUMDes dan Kelompok Tani dalam menyusun dan mengimplemetasikan RTHD dan RDK-KT.

Ketiga uotput tersebut dibuktikan dengan 4 indikator capaian, yakni: 1). Adanya kesepakatan antara BUMDes dan masyarakat perambah tentang tata guna lahan dan pembatasan perambahan, paling lambat pada bulan ke VI. 2). Adanya inisiatif yang berkaitan dengan praktek intensifikasi lahan dimulai pada bulan ke V-VI. 3). Meningkat pemahaman masyarakat

dalam memasarkan produk kopi dan madu. 4). BUMDes dan Kelompok Tani mampu merencanakan, menyusun dan mengimplementasikan RDK-KT dan RTHD pada bulan ke V-VI

Output 1. Pembukaan lahan pertanian dalam kawasan hutan tidak bertambah.

output ini dicapai dengan menggelar 4 kegiatan, yakni:

1. Pelatihan pemetaan tata guna lahan lahan garapan kelompok tani

Pelatihan ini diikuti masing-masing 5 orang perwakilan kelompok tani, dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai kedudukan peta dalam merencanakan dan mengelola lahan, menghimpun informasi awal mengenai penggunaan lahan garapan kelompok tani. Dalam pelatihan peserta mendiskusikan penentuan batas lahan garapan, data apa saja yang diperlukan untuk menyusun rencana pengelolaan lahan garapannya masing-masing. Setelah itu Peserta dilatih cara pemetaan secara teori dan praktik lapang dalam lahan garapan kelompok taninya masing-masing dengan menggunakan *Global Positioning System (GPS)*. Setelah peserta memahami menggunakan GPS dan tata cara pemetaan peserta dibentuk tim pemetaan yang akan memetakan wilayah garapan kelompok taninya masing-masing .

Pelatihan pemetaan tata guna lahan lahan garapan kelompok tani dilaksanakan melalui dua tahap meliputi :

- a. Pelatihan Pemetaan Partisipatif Lahan Garapan Kelompok Tani Tahap I, 15 Agustus 2016 dikediaman Bapak Yusuf Dusun Bungeng desa Pattaneteang dengan melibatkan kelompok tani Bungeng I, Bungeng II, Batumassong Hijau, Batumassong I, Pemuda Tani Kulepang dan kelompok tani kulepang dengan Trainer Balang institute Kamaluddin, Hasri, Andi Adriadi, Marina, Habir, Juned, Thobo.



Gambar 1.16 *Suasana Pelatihan Pemetaan Tahap I*

- b. Pelatihan Pemetaan Partisipatif Lahan Garapan Kelompok Tani Tahap II, 17 Agustus 2016 Dikediaman Bapak Amiruddin S didusun katabung desa pattaneteang dengan melibatkan kelompok tani pucuk mekar, balla lompoa, tunas harapan, kayu mamana', sikamaseang dan biring ere. Dengan trainer Balang Institute (Kamaluddin, Hasri, Andi Adriadi, Marina, Habir, Juned).
- c.



Gambar 1.16 *Suasana Praktek penggunaan GPS Tahap II*

Hasil Pelatihan Meliputi :

- a. Telah terlaksana Pelatihan Tata Guna Lahan Garapan Kelompok Tani Tahap I dan II dengan melibatkan 13 kelompok tani yang juga diikuti Penyuluh BKP3, Pendamping desa dan Kepala Desa Pattaneteang yang ikut belajar dan memantau pelaksanaan pelatihan..
- b. Terbentuk tim pemetaan partisipatif Tata Guna Lahan Garapan Kelompok Tani Desa Pattaneteang yang berjumlah 65 orang yang dibagi di 13 kelompok tani,

masing-masing 5 orang setiap kelompok yang akan memetakan lahan garapan kelompok taninya masing-masing.

2. **Pembekalan tim BUMDes untuk pemetaan tata guna lahan dalam kawasan Hutan Desa**

Tim pemetaan tataguna lahan areal kerja hutan desa beranggotakan 9 Terbagi dari Pengurus BUMDes(1 orang), Kelompok Tani Hutan(7 orang) , BPK3/PPL pertanian(1 Orang). Kesembilan orang tersebut merupakan orang-orang yang selama ini berkafititas dalam hutan, baik itu sebagai sebagai pengelola hutan (petani kopi) maupun pemungut madu hutan dan dianggap paham seluk beluk hutan desa pattaneteang. pembekalan tim bertujuan menentukan objek yang akan dipetakan, pembagian tugas anggota tim dan waktu pelaksanaan pemetaan. Dalam pembekalan ini dipandu langsung fasilitator balang institute dimulai dengan pengantar landasan hukum dan hak pengelolaan Hutan Desa Pattaneteang. Untuk mengakses dan mengelola sumber daya alam yang ada di dalam kawasan hutan, tidak dilakukan serta merta. Tapi harus ada perencanaan dari lembaga pemegang hak pengelola yakni BUMDes Desa Pattaneteang dan salasatu patokan dasarnya adalah menentukan luas area kelolah hutan desa.



Gambar 1.17 *Pelatihan pemetaan tata guna lahan hutan desa*

Rencana pemetaan yang akan dilakukan adalah salah satu langkah awal dalam mengidentifikasi potensi-potensi yang bisa dikembangkan di dalam kawasan hutan Desa Pattaneteang sekaligus mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi. Potensi dan

kendala-kendala inilah sebagai informasi menyusun Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD) untuk satu tahun ke depan. Untuk membangun perencanaan tentunya harus berdasar pada informasi-informasi yang sesuai dengan kenyataan di lapangan serta informasi yang bisa diperoleh dari masyarakat yang selama ini mengelola lahan dalam kawasan hutan desa. Diharapkan melalui pemetaan partisipatif ini dapat memberi informasi sesuai fakta supaya dalam penyusunan RTHD nantinya bisa tepat sasaran.

Setelah fasilitator memberikan pengantar mengenai tujuan pemetaan partisipatif dalam kawasan hutan desa, Habir (Pelatih teknis pemetaan dari Balang Institute) menyampaikan bagaimana proses pemetaan yang akan dilakukan dalam pemetaan partisipatif. Pelatih menyampaikan mengenai teknis pemetaan dengan cara memperlihatkan peta citra kawasan hutan. Pelatih melalui peta kawasan hutan di Desa Pattaneteang menyampaikan mengenai apa saja dan bagaimana cara pemetaan kawasan hutan. Pengenalan tentang apa yang akan dipetakan dalam kawasan hutan cukup penting diketahui terlebih dahulu untuk memudahkan tim pemetaan partisipatif mengambil titik koordinat dalam kawasan hutan.

Hasil Pembekalan pemetaan meliputi:

1. Berdasarkan dari hasil pelatihan pemetaan tata guna lahan di dalam kawasan hutan telah terbangun pemahaman bagi peserta tim pemetaan bahwa pemetaan tata guna lahan di dalam kawasan hutan desa cukup penting karena itu menyangkut soal bagaimana pengelolaan lahan dalam kawasan hutan desa bisa didukung oleh pemerintah serta pengelolaannya bisa tetap terjaga.
2. Peserta menyepakati bersama pemetaan tata guna lahan akan dilakukan pada 10-12 September 2016. Dan setiap tim berangkat paling lambat jam 08.00 pagi.
3. Berdasarkan keputusan bersama tim pemetaan tata guna lahan dalam kawasan hutan menyepakati dibagi dalam 3 tim yakni;
 - Tim 1 akan memetakan batas luar areal secara keseluruhan yang sudah dikelola oleh masyarakat.
 - Tim 2 dan tim 3 akan memetakan areal yang ditanami cengkih. Pemetaan areal yang sudah ditanami cengkih ini tidak terlepas dengan medannya yang cukup

berat sehingga mereka menyepakati untuk membagi dua tim. Tim 2 yang akan memetakan di wilayah *Daulu* dan tim 3 akan memetakan wilayah *lemponga*.

4. Setiap tim menentukan siapa yang memegang *GPS* dalam memetakan batas wilayah cengkih, bekas longsor, mata air dan padang alang-alang dan siapa yang akan mencatat mengenai jenis tanaman di bantaran sungai, mata air serta nama-nama penggarap yang menanam cengkih serta orang yang mengenal medan lapangan atau pengawal jalur dalam artian berpengalaman di dalam kawasan Hutan Desa Pattaneteang.

3. Pemetaan tata guna lahan (dalam dan luar kawasan hutan)

Terdapat 79 orang yang terlibat dalam pemetaan tataguna lahan yang terdiri dari Kelompok tani BUMDes dan Penyuluh BKP3. Pemetaan Tata Guna Lahan dilakukan oleh masing-masing 5 orang perwakilan dari 13 anggota kelompok yang telah dilatih dan dibekali keterampilan penggunaan *GPS* dan objek yang akan dipetakan. Setiap regu pemetaan dipandu oleh personil dari Balang Institute. Pemetaan tata guna Lahan ini dengan mengambil titik koordinat batas lahan garapan kelompok tani yang berjumlah 13 kelompok serta mengambil titik koordinat mata air, lahan bekas longsor, potensi wisata, tempat dikeramatkan dan mengidentifikasi jenis burung yang ada dalam wilayah garapan di 13 kelompok tani.



Gambar 1.18 pemetaan tata guna lahan Poktan



Gambar 1.19 pemetaan tata guna lahan hutan desa

Pemetaan Tata Guna Lahan dalam Kawasan Hutan Desa dilakukan dari unsur Lembaga BUMDes, Petani hutan, Penyuluh BKP3, Pemdes Pattaneteang yang dipandu 4 orang dari Balang Institute. Kesekian jumlah tim pemetaan ini dibagi menjadi 3 grup dan berlangsung selama tiga hari lamanya. Setiap group tim pemetaan dari Balang menjadi koordinator dalam pemetaan tersebut. Group pertama bertugas untuk memetakan batas lahan kopi dan pemanfaatannya dalam kawasan Hutan Desa. Group dua memetakan kebun cengkih dan pemanfaatannya. Sedangkan group tiga melakukan observasi bekas longsor, sumber air, tanaman kayu lokal serta burung yang terdapat dalam kawasan Hutan Desa tersebut.

Tabel 5. Hasil Pemetaan Tutupan Lahan 13 Kelompok Tani

NO	NAMA KELOMPOK	PEMANFAATAN			
		Terbangun	Luas (ha)	Non Terbangun	Luas (ha)
1	Kulepang 1	Tempat Tinggal	0.2	Perkebunan	16
				kebun campur	15
2	Bungeng 2	Tempat Tinggal	0.69	Perkebunan	3
		Pendidikan	0.15	Sawah	7
				Kebun Campur	1
3	Mandiri	Tempat Tinggal	3	Perkebunan	13
		Peribadatan	0.8	Kebun Campur	17
				Sawah	9
4	Tunas harapan	Tempat Tinggal	2	Perkebunan	33
				kebun campur	8
5	Balla Lompoa	Tempat Tinggal	0.26	Perkebunan	28

6	Biring ere	Tempat Tinggal	2	Perkebunan	23
		Peribadatan	0.13	kebun campur	90
		Pendidikan	0.43		
7	Bungeng 1	Tempat Tinggal	0.88	Perkebunan	12
				kebun campur	12
8	Batu Massong 1	Tempat Tinggal	0.57	Perkebunan	2
		Peribadatan	0.2	kebun campur	38
9	Batu Massong Hijau	Tempat Tinggal	0.8	Perkebunan	46
		Peribadatan	0.1	kebun campur	6
				Sawah	3
10	Kayu mamana	Tempat Tinggal	0.86	Perkebunan	35
		Peribadatan	0.2	kebun campur	60
11	Pemuda Tani Kulepang	Tempat Tinggal	0.43	Perkebunan	21
		Peribadatan	0.2	kebun campur	14
12	Pucuk Mekar	Tempat Tinggal	1	Perkebunan	46
		Peribadatan	0.3	kebun campur	30
		Pendidikan	0.11		
13	Sikamaseang	Tempat Tinggal	0.63	Perkebunan	11
				kebun campur	68
TOTAL			15.94		667

Tabel 6. Hasil Pemetaan Tutupan Lahan Dalam Kawasan Hutan

Tutupan Lahan	Luas(ha)
Kebun Kopi - agroforestri	153
Kebun Cengkeh	28
Tanaman Hutan	54
Total	235

4. Lokakarya hasil pemetaan tata guna lahan dan rencana tata guna lahan

Lokakarya dilaksanakan pada 29 Oktober 2016 di aula kantor desa pattaneteang ini untuk menyampaikan potensi dan masalah yang dihimpun selama pemetaan partisipatif tata guna lahan dilakukan. Selain itu juga untuk mendapatkan dukungan para pihak dalam perencanaan pembangunan desa melalui Rencana Tata Guna Lahan. Diikuti 34 peserta, terdiri dari Pemerintah Desa Pattaneteang, BUMDes, BAPPEDA, BPM-PD, Dinas

Pertanian dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, PPL Pattaneteang, Camat Tompobulu, perwakilan masyarakat Pengelola Hutan Desa dan perwakilan kelompok tani Desa Pattaneteang, Rainforest Alliance



Gambar 1.20 Loka Karya Hasil Pemetaan

Presentasi lokakarya ini dibawakan oleh Andi Adriadi selaku Manajer Proyek dari Balang Institute. Di sini disampaikan tahapan kegiatan yang sudah berjalan selama 4 bulan yang telah menghasilkan peta administrasi/ Tata Guna Lahan Desa Pattaneteang yang dibagi atas wilayah garapan kelompok tani dan kawasan hutan desa.

Setelah presentasi peserta dibagi ke dalam tiga grup diskusi:

- grup 1 Kroscek Batas Desa Hasil Pemetaan Partisipatif
- Grup 2 Kondisi Hutan Desa dan Kelembagaan BUMDes
- Grup 3 Legalisasi Keanggotaan dan Rencana Tata Guna Lahan Kelompok Tani

Setiap grup berdiskusi untuk merumuskan solusi dan rekomendasi yang diperlukan untuk masing-masing topik.

Setelah mendiskusikan di kelompoknya masing-masing, perwakilan kelompok diskusi mempresentasikan hasil-hasil diskusinya untuk ditanggapi oleh kelompok lain. Lokarya hasil pemetaan partisipatif secara langsung menghasilkan empat poin, yakni:

- Pemerintah Desa Pattaneteang akan menjadikan hasil pemetaan ini sebagai acuan dalam perencanaan program desa
- Penyuluh dari BKP3 akan menjadikan acuan peta kelompok untuk kebijakan program pertanian dan akan membantu kelompok tani untuk mendaftarkan kelompok tani di BKP3.

- Dinas Pertanian Kabupate Bantaeng langsung memberikan bantuan 2 unit traktor untuk mengapresiasi data kelompok tani desa pattaneteang.
- Kepala Bappeda mengharapkan perencanaan pembangunan di tingkat desa dilakukan dengan cara yang sama yang dilakukan oleh program CEPF di Desa Pattaneteang yakni menyiapkan data tata guna lahan sebagai dasar untuk merencanakan pembangun.

5. Pengembangan pola pertanian berkelanjutan melalui intensifikasi lahan pertanian

Diskusi pengembangan pola pertanian berkelanjutan digelar sebanyak 6 putaran. Dilaksanakan dimasing-masing sekretariat 13 kelompok tani (kelompok tani bungeng I, Bungeng II, Batumassong Hijau, Batumassong I, Kulepang , Pemuda Tani Kulepang, Pucuk Mekar, Tunas Harapan, Balla Lompoa, Kayu Mamana', Sikamaseang, Biring Ere) dengan total peserta 68 orang. Diskusi tersebut bertujuan menggali pengetahuan petani mengenai tantangan dalam mengelolah lahan. peggaloo ini menemukan banyak hal penting yang menjadi informasi awal untuk menentukan model penerapan demplot pertanian yang berkelanjutan.



Gambar 1.21 *FGD Pengembangan pola pertanian berkelanjutan*

Informasi mengenai pengetahuan dan pola pengelolaan lahan yang diterapkan petani di pattaneteang antara lain:

- a. Pengelolaan lahan dengan satu jenis tanaman (monokultur) yang jarak tanamnya diatur dengan rapih hasilnya lebih maksimal dibanding dengan model banyak jenis tanaman dalam satu lahan. Namun demikian, kebun dengan satu jenis tanaman biasanya hanya

dipraktekkan petani yang memiliki lahan luas. petani dengan lahan sempit biasanya menerapkan pola tani campur.

- b. Anomali siklus musim mempengaruhi produktivitas tanaman. misalnya kemarau yang berlangsung 7 bulan pada tahun 2015 menyebabkan banyak pohon cengkih yang mengalami kekeringan lalu mati. Sebaliknya hujan yang mulai turun menjelang pertengahan 2016 yang tidak berhenti hingga Agustus 2017 menyebabkan tanaman cengkih dan buah-buahan tidak berbuah. pala dan kopi tetap berbuah akan tetapi produksinya turun hingga 60%.

Kedua poin di atas menjadi informasi penting dalam menetapkan model pertanian berkelanjutan melalui intensifikasi lahan pertanian.

6. Penerapan pembelajaran petani melalui Sekolah Lapang dan demplot percontohan pertanian berkelanjutan

Penerapan pembelajaran petani melalui sekolah lapang diikuti 30 peserta yang merupakan perwakilan 13 kelompok tani. Sekolah lapang dibagi menjadi dua sesi kegiatan, yakni sharing pembelajaran di kelas mengenai pengalaman petani dalam mengelola lahan dan praktek lapang.



Gambar 1.22 *Sharing Pembelajaran di Kelas*

Sharing pembelajaran di kelas membuahkan informasi penting mengenai musim yang tidak menentu (perubahan iklim) berpengaruh pada produksi/buah tanaman perkebunan. Kemarau panjang yang berlangsung 7 bulan pada tahun 2015 menyebabkan banyak poho

cengkih beberapa tanaman kopi mati kekeringan. sebaliknya hujan yang turun menjelang pertengahan tahun 2016 hingga pertengahan 2017 membuat tanaman cengkih dan buah-buahan tidak menghasilkan buah. Dampak perubahan musim ekstrim yang terjadi pada 2015 dan 2016 sangat dirasakan oleh petani lahannya hanya ditanami cengkih. Sementara bagi petani yang dikebunnya terdapat banyak tanaman seperti pisang, cabe, jahe masih bisa menunggu hasil.

Informasi penting lainnya berkaitan dengan trend penembak burung yang marak tiga tahun terakhir. Para penembak burung yang rajin menyambangi kebun dan sawah menyebabkan burung menghilang, bersamaan dengan itu petani merasakan peningkatan serangan hama ulat pada tanaman padi dan hama penggerek batang pada tanaman cengkih.

Pada sharing pembelajaran tersebut juga terungkap informasi mengenai watak petani di pattaneteang yang mudah tergoda untuk mengganti tanamannya karena pengaruh harga di pasar. Misalnya pada pertengahan 80-an petani ramai-ramai menebang tanaman cengkih dan mengganti dengan kopi, alasannya harga cengkih sangat murah. Sebaliknya kenaikan harga cengkih pada momentum kejatuhan Soeharto dan harganya bertahan hingga kini membuat petani terus menebang kopi dan mengganti dengan tanaman dengan cengkih.

Informasi diatas menunjukkan perlunya ruang diskusi untuk memahami lebih jauh keterkaitan antara musim, jenis tanaman, keberadaan satwa, kedudukan pasar dan perencanaan tepat dalam mengelola lahan. Pada akhirnya peserta sharing pembelajaran menyepakati untuk membuat demoplot pengembangan pola pertanian berkelanjutan melalui intensifikasi lahan pertanian pada kebun cengkih, kebun kopi dan kebun campur. Demoplot tersebut akan menjadi laboratorium bersama bagi petani di pattaneteang yang bisa diadaptasi dalam penyusunan RDK-KT.

Lokasi Demplot dan Jenis Komoditi yang ditanam

a. Lahan Cengkih



Gambar 1.23 Lokasi Demplot Cengkih

Untuk Lahan Demplot Cengkih ditempatkan di Dusun Bungeng Kamp. Batumassong Lahan Milik Abdul Haris. Pada Lahan Ini sesuai Model pengembangan sistem pertanian berkelanjutan. Pada Lahan ini yang ditanam meliputi Pohon Pala, Merica, Sereh dan Cabe .

b. Lahan Kopi



Gambar 1.23 Lokasi Demplot kopi

Untuk Lahan Demplot Kopi ditempatkan di Dusun Katabung Lahan Milik Ramli. Pada Lahan Ini yang ditanam meliputi Merica, Jahe Merah, Pala dan kayu Suren.

c. Lahan Campuran



Gambar 1.24 *Lokasi Demplot Campuran*

Untuk Lahan Demplot Campuran ditempatkan di dusun Biringere Lahan Milik H.Cugo. Pada Lahan ini didominasi kayu-kayuan dan kopi. Adapun yang ditanam adalah kayu-kayuan dan jahe merah.

7. Pelatihan pemasaran produk olahan Kopi dan Madu

Pelatihan produk olahan kopi dan madu digelar tiga hari secara terpisah di Aula Kantor Desa Pattaneteang dengan peserta yang berbeda. Pelatihan pemasaran kopi hari pertama melibatkan narasumber Bapak A.Mappatoba, M.Si selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja & Perindustrian Kab. Bantaeng dengan melibatkan peserta sebanyak 15 orang terdiri dari perwakilan kelompok tani dan BUMDes dan dilanjutkan dihari kedua dengan peserta yang sama yang di pandu fasilitator balang institute dilanjutkan dengan FGD peserta yang dipandu langsung oleh direktur balang institute adam kurniawan setelah mengevaluasi materi hari pertama terkait:

- Perbaikan tata guna lahan
- Model Perawatan kopi
- Pengolahan pasca panen
- Menggali model budidaya kopi petani
- Menggali masalah petani dalam pengolahan lahan perkebunan kopi
- Menggali masalah skema pemasaran kopi petani

Sedangkan pada pelatihan pemasaran madu ini melibatkan nara Sumber bapak Dirga Ali Imran Koordinator PLUT(Pusat layanan usaha terpadu) yang direkomendasi oleh ibu kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kab. Bantaeng. Dengan total peserta 15

orang yang kebanyakan petani ternak dan pemungut madu dikawasan hutan dan areal sempadan sungai bialo.



Gambar 1.25 *Pelatihan Pemasaran Kopi & Madu*

Secara umum pelatihan ini bertujuan memberikan ruang kepada petani untuk berbagi pengalaman mengenai kopi dan madu, sekaligus memberikan informasi mengenai kemungkinan membuka peluang pasar dengan harga lebih tinggi.

Terdapat 3 jenis kopi di desa pattaneteang, yakni arabika, robusta dan liberika. dari ketiga jenis kopi tersebut yang bernilai ekonomis hanya arabika dan robusta, liberika hanya dijadikan tanaman pembatas kebun. Informasi yang dikumpulkan dari putaran diskusi penyusunan RDK-KT produksi kopi arabika diperkirakan rata-rata 5.55.200 kg/tahun dan 85.000 kg/tahun untuk kopi robusta. Sementara produksi madu diperkirakan 1050 liter pertahun, 300 liter madu ternak dan 750 liter madu hutan.

Selama ini kopi arabika dari pattaeteang dijual ke pedagang pengumpul dalam bentuk kopi kulit tanduk dengan harga Rp.13.000/liter, sementara madu hutan Rp.120.000/liter. melalui pelatihan pemasaran produk olahan balang akan memfasilitasi penjualan kopi dan madu ke koperasi akar tani dengan harga lebih tinggi, Rp.17.000/liter untuk kopi arabika dan Rp. 50.000/liter untuk madu hutan. Peningkatan harga tersebut dengan ketentuan petani mematuhi standar pengolahan yang ditetapkan koperasi akar tani. Untuk kopi arabika standarnya adalah petik merah, dan untuk madu hutan penirisan atau pemisahan madu dari sarangnya dibiarkan meneteas secara alamiah, tidak diperas atau diuapkan.

Selain mendapatkan peningkatan harga penjualan dengan kesepakatan mamtuhi standar penaaanganan tertentu, pelatihan ini juga melahirkan rekomendasi untuk dinas pertanian untuk memfasilitasi peremajaan tanaman kopi dan rekomendasi untuk dinas koperasi untuk memfasilitasi pembuatan label dan pengemasan.

8. Penyusunan RDK-KT disusun di 13 kelompok tani

Putaran diskusi penyusunan RDKT melibatkan 123 perwakilan 13 kelompok tani. ada empat topik utama yang didiskusikan yakni:

- keadaan umum lahan garapan kelompok
- Potensi lahan garapan
- pola tanam dan pola usaha tani
- perencanaan kelompok



Gambar 1.26 *Penyusunan RDK-KT Kelompok Tani*

Putaran diskusi penyusunan RDK-KT menghasilkan informasi keadaan lahan garapan dan teknologi pendukung sebagai berikut:

- Lahan pertanian desa pattaneteang seluas 685 ha digarap 805 Rumah Tangga Petani
- terdapat 38 jenis tanaman kehutanan denga 40.008 tegakan

- tanaman perkebunan: kopi 303.500 pohon, cengkih 62.450 pohon, pala 1.560 poho, kakao 100 pohon dan merica 1.060 pohon
- tanaman buah: alvokad 1.600, durian 2.345 pohon, langsung 980 pohon, nangka 3.270 pohon, dan rambutan 70 pohon
- gilingan manual kopi 17 unit, pulper 27 unit, grinder 15 unit, hand tracktor 2 unit, pemotong rumput 7 unit, pompa air 4 unit, chainsaw 34 unit, combine 2 unit, mesin rontok 3 unit dan gilingan padi 4 unit.

rekapitulasi rencana pengadaan bibit, infrastruktur dan teknologi pendukung sebagai berikut:

- kebutuhan bibit tanaman kehutanan 45.600 pohon, arabika 97.200 pohon, pala 55.000 pohon, merica 294.200 poho, manggis 5000 poho, cengkih 15.000 pohon, kaliandra 30.000 pohon.
- rencana infrastruktur: jalan usaha tani 51 km, irigasi 46 km, checkdam mini 7 unit, perpipaan 8 km, terasering 3 ha, embung 28 unit, baruga tani 1 unit.
- kebutuhan teknologi pendukung: hand tracktor 2 unit, pemotong rumput 39 unit, pompa air 37 unit, penyemprot gulma 37 unit, chainsaw 22 unit, combine 6 unit, pengerig kopi 7 unit, pulper 35 unit, huller 10 unit, roasting 15 unit, grinder 6 unit, mesin kemasan 1 unit, pemipil cengkih 28 unit.

9. BUMDes bersama Pemerintah Desa dan masyarakat menyusun RTHD

Diskusi penyusunan berjalan alot karena berdasarkan hasil pemetaan partisipatif tataguna lahan luas areal kerja hutan desa Pattaneteang adalah 235 ha, sementara SK kementerian adalah 339 ha.

Batas kawasan hutan versi peta kemeterian kehutanan dengan versi masyarakat juga berbeda. Untuk menggali lebih jauh sejarah penetapann batas tim lapangan melakukan wawancara mendalam pada informan kunci.



Gambar 1.27 *Penyusunan RTHD(Rencana Tahunan Hutan Desa)*

Informasi yang berhasil dihimpun dari putara diskusi dan wawancara mendalam antara lain, terdapat 27 orang yang menanam cengkik dalam areal kerja hutan desa, 27 orang tersebut memiliki SPPT yang dibayar setiap tahun. terdapat 41 orang menanam kopi dalam areal kerja hutan desa, 41 orang tersebut tidak memiliki SPPT dan mengakui lahan mereka tanami adalah kawasan hutan desa.

Perbedaan luasan juga berimbas pada pembagian blok, misalnya blok perlindungan anoa yang semestinya tak ada aktifitas pengelolaan masyarakat di dalamnya, fakta di lapangan blok ini terdapat tanaman kopi. Namun demikian, aktivitas yang berkaitan dengan penanaman dan pengelolaan hasil hutan tetap direncanakan. untuk menyelesaikan perbedaan data dan perbedaan persepsi mengenai batas, RTHD 2017 memuat rekomendasi untuk memvalidasi luas areal kerja hutan desa dan menata ulang blok dalam hutan desa.

10. Konsultasi dan Penyusunan RTR-Desa yang mengacu pada RTHD dan RDK-KT

Putaraan pertemuan penyusunan RTR-Desa dan konsultasi dengan BPD yang didampingi fasilitator pendamping desa menghasilkan kesepakatan untuk merubah nama Rencana Tata ruang Desa menjadi Rencana Tata Guna Lahan. Perubahan tersebut didasari pertimbangan yang akan diatur di desa pattaneteang sebagian besar adalah lahan pertanian, kehutanan. Lahan yang diperuntukkan untuk pemukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum sangat sedikit.

Dengan demikian dokumen yang disusun akan lebih berorientasi pada pengelolaan lahan yang mengutamakan aspek keberlanjutan lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat dari pengelolaan lahan. Dokumen RTGL yang dihasilkan mengacu pada RDK-KT dan RTHD



Gambar 1.28 *Penyusunan RTGL*

11. Presentasi ke para pihak

Presentasi para pihak dalam hal ini dinas yang terkait dengan perencanaan pembangunan dan pengelolaan lahan di desa pattaneteang, terutama untuk menyelesaikan perbedaan luas desa dan luas kawasan hutan versi pemerintah dengan keadaan di lapangan, upaya menarik dukungan dinas untuk mengimplementasikan RTGL dan pengembangan kopi sebagai komoditi perkebunan paling besar di Pattaeteang.

Dinas yang kunjungi yakni BAPPEDA, Dinas Pertanian dan perkebunan, Dinas Perindustrian, dan Dinas Koperasi. kepala dinas yang menerima langsung perwakilan balang menyarankan untuk menggelar pertemuan yang menghadirkan dinas terkait lainnya seperti dinas pariwisata dan dinas pemberdayaan masyarakat desa.



Gambar 1.29 *Presentase Para Pihak*

Berdasarkan saran tersebut digelar mini workshop yang menghadirkan perwakilan masyarakat desa pattaneteang, pemerintah kecamatan, dinas pertanian, pemberdayaan masyarakat, dinas dinas pariwisata, dinas koperasi dan dinas perindustrian. BAPPEDA dan kepala desa Pattaneteang berhalangan hadir.

Dalam kegiatan tersebut fasilitator balang bersama perwakilan masyarakat desa pattaneteang mempresentasikan poin-poin rencana tata guna lahan desa pattaneteang yang meliputi rencana pengelolaan lahan, pengadaan teknologi pengelolaan lahan dan pengolahan hasil pertanian, pembangunan infrastruktur yang mendukung pengelolaan lahan dan pengembangan ekowisata.

Perbedaan luas wilayah administrasi desa dengan hasil pemetaan partisipatif mendapatkan porsi diskusi yang cukup besar, mulai dari metode pemetaan hingga legalitas tim pemetaan dan peta yang dihasilkan. Dinas pemberdayaan masyarakat desa paling aktif menyoroti hasil pemetaan. Direktur Balang Institut kemudian menjelaskan proses pemetaan yang melibatkan partisipasi masyarakat luas dan mengundang dinas terkait pada saat lokakarya hasil pemetaan adalah dalam rangka menghasilkan peta yang menampilkan keadaan nyata di lapangan, baik itu dari luasan, penggunaan lahan, penguasaan lahan hingga potensi yang terdapat di permukiman tanah di desa pattaneteang. Peta tersebut digunakan untuk menyusun perencanaan pembangunan di desa pattaneteang, jika kemudian peta tersebut menimbulkan polemik karena berbeda dengan peta resmi yang dimiliki pemerintah, maka adalah tugas pemerintah untuk memfasilitasi pembuatan atau pengesahan peta yang sesuai dengan keadaan di lapangan.

Setelah mendapatkan penjelasan memadai, forum menyepakati agar peta tersebut dikonsultasikan lebih lanjut dengan bagian pemerintahan sekretariat daerah kabupaten Bantaeng, bila perlu balang diminta menggelar pertemuan yang khusus membahas peta.

Hasil penting lain yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah komitmen dinas pertanian untuk merealisasikan nanaa bibit kopi untuk petani di pattaneteang, lebih jauh dinas

perindustrian akan menginisiasi pembentukan POKJA pengembangan kopi untuk memastikan dukungan pada petani dalam memproduksi bahan baku kopi untuk sentra IKM kopi yang dibangun dinas perindustrian. sementara dinas pariwisata akan membentuk kelompok masyarakat sadar wisata dan mengusulkan desa pattaneteang sebagai desa wisata yang merupakan program dias pariwisata tingkat provinsi. Dinas koperasi akan memfasilitasi pengemasan madu dari kelompok tani di desa pattaeteang.

IV. PERUBAHAN

1. Pengurangan ancaman terhadap spesies prioritas (tidak perlu diisi apabila program TIDAK menysar pada Arahan Strategis 1)

Nama Spesies Prioritas	Ancaman	Status	Dokumen verifikasi
Burung	Perburuan	100-70 = 30 (Berkurang 70%)	(Survey/monitoring baseline dan endline)
Ayam Hutan	Perburuan	2 -2 = 0 (Berkurang 100%)	
Anoa	Perburuan	1-1 = 0 (Berkurang 100%)	
Macaca Maura	Perburuan	5-5 = 0 (Berkurang 100%)	
Babi Hutan	Perburuan	5-2 = 3 (Berkurang 20%)	
Kuskus	Perburuan	1-1 = 0 (Berkurang 100%)	
Ikan Sidat	Racun	1-1 = 0 (Berkurang 100%)	
Biawak	Racun	1-1 = 0 (Berkurang 100%)	

2. Peningkatan pengelolaan terhadap KBA

Nama KBA	Bentuk Peningkatan Pengelolaan KBA	Luas (bagian) KBA yang Mendapatkan Peningkatan Pengelolaan	Dokumen Verifikasi
	1. Pemetaan partisipatif untuk meentukan areal perlindungan air di dalam dan di luar kawsan hutan desa, serta areal perlindungan anoa di dalam kawasan hutan desa.		1. Peta tata guna lahan desa Pattaneteang 2. Peta lahan garapan 13 Kelompok Tani



<p>KBA Karaeng- Lompobattang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penyusunan dokumen RDK-KT 13 kelompok tani. Dokumen tersebut memuat rencana penggunaan lahan pertanian yang mendukung konservasi tanah dan air melalui penentuan jenis tanaman serta area perlindungan mata air dan sungai. 3. Penyusunan Dokumen RTHD. Dokumen tersebut memuat rencana pemanfaatan areal hutan desa yang tidak mengganggu fungsi hutan (penanaman tidak masuk lagi dalam rencana) dan menyepakati areaa perlindungan anoa. 4. Sekolah Lapang pengembangan pola pertanian berkelanjutan. Menghasikan skema pemanfaatan kebun dengan jenis dan pengaturan tanaman agar produktif dan adaptif terhadap perubahan iklim. 5. Pelatihan pemasaran kopi. Melahirkan pengetahuan dan keterampilan penggunaan lahan dengan pola agroforesti dan perawatan tanaman kopi agar menghasilkan buah kopi yang berkualitas. 	<p>913 Ha di desa Pattaneteang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Dokumen RDK-KT 13 kelompok tani. 4. Desain pola pengembangan pertanian berkelanjutan. 5. kebunn percontohan pengembangan pertanian yang prodduktif dan berkelanjutan. 6. Skema pemasaran Kopi.
--	--	--	--

3. Perlindungan kawasan (formal protected area)

Nama Kawasan	Bentuk Perlindungan Kawasan	Luas Kawasan/Tahun Penetapan	Dokumen Verifikasi
		SK Penetapan Areal Kerja (PAK) Hutan Desa dari	

Kawasan Lindung Konservasi	Hutan dan	Hutan Desa	Kementerian Kehutanan: No. 55/Menhut-II/2009	
			SK Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) dari Gubernur Sulawesi Selatan: No. 3804/XI/2010	Lampiran SK HPHD
			SK pengesahan Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD) dari Gubernur dengan No. 1465/V/2012	Lampiran Lembar pengesahan RKHD
			pengesahan Rencana Tahunan Hutan desa (RTHD) oleh bupati Bantaeng pada tahun 2014.	Lampiran pengesahan RTHD

4. Penerima manfaat

a. Karakteristik penerima manfaat (*silahkan tera checklist pada tiap kolom yang relevan*)

	Jenis Komunitas							Ukuran Komunitas Penerima Manfaat			
	Ekonomi Subsisten	Small landowners	Masyarakat hukum adat/komunitas lokal	Pastoralists / nomadic peoples	Recent migrants	Komunitas Perkotaan	Lainnya	50 sampai 250 jiwa	251 sampai 500 jiwa	501 sampai 1000 jiwa	Diatas 1000 jiwa
13 Kelompok tani dan BUMDes Pattaneteang			√								√

b. Jumlah penerima manfaat

Jenis Manfaat	Jumlah Penerima Manfaat (Laki-Laki)	Jumlah Penerima Manfaat (Perempuan)
Meningkatnya akses untuk air bersih		
Meningkatnya ketersediaan pangan		
Meningkatnya akses ke sumber energi (listrik)		
Meningkatnya akses layanan publik (mis. Kesehatan, pendidikan dll.)		
Meningkatnya daya tahan terhadap perubahan iklim	1103	1129
Kepemilikan lahan yang jelas	865	
Pengakuan atas kearifan lokal	1103	1129
Keterwakilan dan kesempatan yang semakin besar untuk pengambilan keputusan di pemerintahan melalui kegiatan <ul style="list-style-type: none"> - penyusunan RTHD(Rencana Tahunan Hutan Desa) - Loka Karya Hasil Pemetaan Partisipatif - RTGL(Rencana Tata Guna Lahan) - RDKKT(Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani) 	23	13
	22	1
	153	12
	88	20
Peningkatan akses atas jasa lingkungan		
Pelatihan Pemetaan Partisipatif	74	
Pelatihan Pemasaran Kopi dan Madu	30	
Pelatihan Sekolah lapang	36	
Lain-lain		
Total Penerima Manfaat	3497	2304

5. Regulasi/kebijakan lokal

Nama Regulasi/Kebijakan	Ruang Lingkup (nasional, lokal, desa)	Topik	Hasil yang Diharapkan
Peta Desa	Kabupaten , Desa dan Nasional	Memperjelas batas administrasi dan luasan desa	Peta Desa akan menjadi acuan dasar bagi Pemdes pattaneteang untuk melakukan rasionalisasi pemberian Alokasi Dana Desa (ADD). Tidak lagi memakai perkiraan luas wilayah dan peta administrasi dari kabupaten seperti sebelumnya. Luasan ini akan dipedomani Pemkab untuk pemberian ADD untuk Desa Pattaneteang. Batas Desa Pattaneteang KAB. Bantaeng dengan Kel.Borongrapoa Kab. Bulukumba menempatkan Sungai Bialo sebagai batas kabupaten.
Peta Kelompok Tani	Kabupaten dan Desa	Memperjelas areal kerja 13 kelompok tani berbasis hamparan	Peta Kelompok tani berbasis hamparan didesa pattaneteang akan menjadi acuan bagi Dinas

			Ketahanan pangan Kab. Bantaeng untuk dipedomani bagi kelompok tani di 67 desa kelurahan dikabupaten bantaeng
PERDES	Di desa pattaneteang	-Perlindungan Mata Air -Perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati desa pattaneteang jenis Burung endemic Sikatan Lompobattang(Ficedulla Bonthaina) Anoa(Bufallo), Katak Lompobattang,Pohon Endemik Lompobattang	Jaminan keberlanjutan wilayah perlindungan masyarakat yang di dalamnya terdapat area penting, spesies penting dan menjadi potensi destinasi ekowisata.
Skema Peningkatan Komoditi Kopi	Kabupaten dan Desa	Memperjelas Model pengelolaan dan peningkatan nilai ekonomi komoditi kopi	Skema Peningkatan nilai komoditi yang berakar dari pengelolaan kelembagaan kelompok tani yang mengedepankan prinsip pertanian berkelanjutan menjadi roadmap dalam upaya melahirkan kopi specialty yang bersertifikat guna peningkatan nilai ekonomi kopi dikabupaten bantaeng.

6. Jaringan kerja/forum multipihak

(jaringan atau kemitraan yang terbentuk sebagai hasil dari program yang dilaksanakan. Jaringan atau kemitraan ini berkaitan dengan capaian program, contoh : forum pengelolaan daerah tangkapan air, yang bertujuan sebagai forum komunikasi dan kerja bersama parapihak dalam pengelolaan daerah tangkapan air.)

Nama Jaringan/Kemitraan	Ruang Lingkup (nasional, lokal)	Tujuan Penetapan	Tahun Penetapan

7. Bentang alam produktif

Nama Bentang Alam Produktif	Bentuk Peningkatan Pengelolaan Bentang Alam Produktif	Luas (bagian) Bentang Alam Produktif yang Mendapatkan Peningkatan Pengelolaan	Dokumen Verifikasi
Pegunungan Lembah Sungai	1. Penetapan zona-zona ruang di desa	Desa Pattaneteang Pemukiman : 13 Ha Persawahan 19 Ha	Peta partisipatif dan Rencana Pengelolaan Tata guna lahan

	<p>untuk menghindari konflik dan tumpang tindih.</p> <p>2. Perlindungan Mata Air dan Perlindungan keragaman hayati (jenis kunci) di wilayah perlindungan masyarakat</p>	<p>Perkebunan : 291 Ha Kebun Campur 346 Ha Hutan : 235 Ha Wisata : 0,42</p>	
--	---	--	--

V. PEMBELAJARAN

- Kegiatan atau strategi apa yang berhasil dengan baik, Mengapa demikian?
 1. Metode partisipatif dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek kegiatan

Pelibatan masyarakat secara luas dengan pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam kegiatan pengumpulan data dan penyusunan dokumen perencanaan berhasil mengartikulasikan kepentingann masyarakat sejalan dengan upaya pengelooan lahan yang mengutamakan kelestarian lingkungan. Pengarusutamaan kelestarian ligkungan dalam merencanakan pengelolaan lahan bisa dilihat dengan adanya kesepakatan kelompok tani untuk membuat sempadan sungai dan mata air sebagai kawasan lindung setempat. kesepakatan tersebut bia dilihat dalam dokumen RDK-KT

Keberhasilan yang dijelaskan diatas didukung oleh pengetahuan fasilitator yang memadai mengenai keadaan sosial budaya di lokasi program, serta kesediaan fasilitator untuk melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan di desa atau kelompok tani.

2. Peta partisipatif tata guna lahan

Peta tata guna lahan yang dibuat secara partisipatif mendapatkan kepercayaan yang besar dari pemerintah. Peta tersebut dijadikan acuan untuk pemantapan batas antara



kabupaten bantaeng dan bulukumba, yang mediasi konfliknya telah sampai ke meja Kementerian Dalam Negeri. Bupati bantaeng meneken proposal pembuatan peta serupa untuk 7 desa di kecamatan uluere.

3. Pengembangan mata pencaharian masyarakat

Keberhasilan program ini dalam meningkatkan harga penjualan kopi yang semula Rp.13.000/liter menjadi Rp.17.000/liter tidak lepas dari ketersediaan data potensi baku, keunggulan produk, kemampuan menembus pasar alternatif serta kemampuan menjaring dukungan pemerintah.

Untuk mesarkan kopi dari hutan desa pattaneteag, balang menggandeng koperasi akar tani. Koperasi akar tani memberikan skema pasar kopi dari bantaeng, lalu mendatangkan mitra bisnisnya SOFI KOPI untuk bertemu dan bernegosiasi langsung dengan petani kopi di pattaneteang. Dengan dukungan data yang diperoleh dari RDK-KT dan jaminan dari balang institute untuk menjaga kualitas sesuai permintaan, petani 3 orang petani meneken kontrak untuk menyediakan bahan baku masing-masing 1 ton gabah kopi yang akan dibeli koperasi akar tani dengan perbedaan harga Rp.17.000/liter panen 2017, pembelian pedagang lokal Rp13.000/liter. Untuk masa panen 2018, koperasi akar tani meneken kontrak dengan 3 kelompok dengan harga Rp. 18.000 untuk gabah kopi semi wash proses dan Rp.20.000 untuk honey proses.

Sementara keberhasilan dalam menjaring dukungan pemerintah adalah 3 kelompok tani mendapatkan bantuan bibit kopi arabika masing-masing 2.000 pohon dari Dinas Pertanian. Dinas koperasi bersedia memberikan bantuan 5 unit pulper dan menginisiasi pembentukan pokja pengembangan kopi.

- Adakah hal atau kegiatan yang di masa depan sebaiknya dilakukan dengan cara berbeda, mengapa demikian?

- Partisipasi Perempuan

program ini gagal menghadirkan perempuan dalam pemetaan partisipatif. pemetaan partisipatif dianggap harus menempuh medan yang berat dan yang ikut diutamakan orang yang menguasai medan yang akan ditempuh dan tahu batas hutan maupun batas desa, dan informasi tersebut hanya diketahui oleh laki-laki. Ke depan harus

ada penekanan yang menjelaskan petingna perempuan ikut dalam pemetaan, agar perempuan juga memiliki pengetahuan mengenai keadaan alam di desa, sehingga cara pandang perempuan yang sering menekankan pentingnya mengalokasikan penggunaan lahan yang menghasilkan pangan untuk keluarga terakomodir dalam perencanaan penggunaan lahan.

- Kampanye Konservasi Keanekaragaman hayati

Dalam program ini tidak pernah digelar kampanye perlindungan keanekaragaman hayati ditingkat dasar seperti kampanye perlindungan satwa di tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA ataupun dikalangan Komunitas pecinta alam. Terfokusnya kegiatan dilokasi desa pattaneteang dengan item perlindungan tapak membuat porsi kegiatan disektor kelompok tani lebih dominan. Padahal didesa pattaneteang khusus kawasan hutan memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa seperti Anoa, Burung Sikatan Lompobattang, Katak Lompobattang dan aneka Tumbuhan endemik yang dijumpai didalam kawasan hutan yang saat ini terancam punah akibat perburuan. Potensi keanekaragaman hayati di hutan desa pattaneteang ini menjadi modal destinasi ekowisata bagi desa. Diharapkan kedepan kegiatan kampanye perlindungan keanekaragaman hayati dapat disentuh lebih maksimal melalui kegiatan yang menarik semisal Sekolah kader konservasi, Lomba Fotografi serta kampanye aktif disekolah-sekolah dan media sosial.

Isu	Keberhasilan/Kurang berhasil	Faktor Penyebab	Dampak	Rekomendasi
Hasil : a. Perubahan pengetahuan b. Perubahan sikap	a. Kesadaran kritis dan kesadaran pentingnya membangun jaringan dan berkelompok terbangun b. Inisiatif warga membangun jadwal pertemuan	a. Kurang maksimalnya SDM kelembagaan dikelompok tani membuat warga antusias untuk membangun pengetahuan kelompok . b. Warga terlalu sibuk di lahan pertanian di pagi sampai	a. Mudah menyampaikan pendapat dan banyak bertanya dalam diskusi b. produktif	a. Peningkatan pengetahuan kelembagaan dan SDM kelompok tani b. Peningkatan jaringan

<p>c. Perubahan perilaku</p>	<p>c. Partisipasi warga yang aktif dalam kegiatan program meningkat</p>	<p>sore hari sehingga kebanyakan jadwal pertemuan dilaksanakan malam hari guna memaksimalkan kehadiran anggota kelompok.</p> <p>c. Aktivitas – aktivitas merupakan hal baru untuk warga desa-desa dampingan</p>	<p>c. Koordinasi meningkat</p>	<p>c. Lauching hasil program kepada para pihak (Pemerintah dan Warga desa, PT.Mega Power, Bupati Bantaeng, SKPD terkait dan DPRD)</p>
------------------------------	---	---	--------------------------------	---


Proses : a. Perencanaan	Adanya kegiatan terlaksana diluar perencanaan	Kegiatan pelatihan pemasaran kopi perlu melahirkan output yang langsung dirasakan petani sehingga menjadi motivasi bagi petani	Lahirnya produk kopi kemasan Daulu yang menggenjot harga kopi lokal arabika desa pattaneteang	Assessment harus lebih maksimal
	Adanya Perubahan nama kegiatan	Perubahan tersebut didasari pertimbangan yang akan diatur di desa pattaneteang sebagian besar adalah lahan pertanian, kehutanan sementara Lahan yang diperuntukkan untuk pemukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum sangat sedikit	Kegiatan penyusunan RTR-Desa(Rencana tata ruang desa) dirubah ke kegiatan penyusunan RTGL(Rencana Tata Guna Lahan) yang mengacu pada RDKKT dan RTHD	Assessment harus lebih maksimal
b. Pelaksanaan	Kerap peserta yang hadir melebihi undangan	Antusias warga terhadap program mengundang rasa ingin tahu petani yang lain	Lebih banyak warga yang mengetahui perkembangan program	Menambah estimasi peserta kegiatan
	Kurang terlibatnya perempuan dalam pelaksanaan pemetaan	pemetaan partisipatif dianggap harus menempuh medan yang berat dan yang ikut diutamakan	Keterwakilan perempuan dalam memetakan wilayah dan memperoleh pengetahuan potensi	Mengusulkan keterwakilan perempuan dalam tim pemetaan

		orang yang menguasai medan yang akan ditempuh dan tahu batas hutan maupun batas desa, dan informasi tersebut hanya diketahui oleh laki-laki	tutupan lahan tidak ada padahal banyak perempuan juga berprofesi petani.	
	Kurangnya peserta yang hadir dalam konsultasi para pihak	Bertepatanannya pelaksanaan Konsultasi para pihak dengan penyusunan RTRW Kabupaten Bantaeng secara tiba-tiba membuat hanya sebagian perwakilan dan utusan dari OPD dan SKPD yang hadir	Tidak maksimalnya konsultasi para pihak	Audiensi untuk memastikan perencanaan kegiatan program yang tidak bertabrakan dengan kegiatan pemerintah daerah khususnya dibagian sekretariat daerah

VI. STATUS KEUANGAN

Status keuangan program, dapat dilihat pada pencatatan keuangan di bawah ini:

- a. Pemasukan : Rp. 173.344.150 (2 termin)
- b. Pengeluaran : Rp. 252. 481.000
- c. Saldo : (minus) Rp 79.136.850



Masih ada sekitar **Rp 79.136.850** dana program yang akan ditransfer setelah semua kelengkapan laporan narasi dan keuangan dinyatakan sudah diterima oleh Burung Indonesia.